

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

(The Influence of District Own Source Revenue and Balance Fund to the Amount of Poverty at Banyuwangi District on 2000-2012 Year)

Andy Kurniawan Firmansyah, Sunlip Wibisono, Petrus Edi Suswandi
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: andykurniawan1007@gmail.com

Abstrak

Lahirnya desentralisasi fiskal menuntut setiap wilayah termasuk Kabupaten Banyuwangi untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri. Banyuwangi sebagai suatu wilayah kabupaten dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi untuk membiayai segala kebutuhannya dengan dibantu oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. Adanya pengelolaan yang tepat sasaran atas PAD dan dana perimbangan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi tersebut, termasuk masalah kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh (PAD) dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data PAD, data dana perimbangan, data jumlah penduduk miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu uji asumsi klasik, analisis deskriptif statistik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan PAD maka akan mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu PAD berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012. Selain itu adanya kenaikan dana perimbangan maka akan mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012.

Kata Kunci: dana perimbangan, desentralisasi fiskal, jumlah penduduk miskin, otonomi daerah, PAD

Abstract

The appearance of fiscal decentralization requires each region including Banyuwangi district to finance their needs independently. Banyuwangi as a district is required to produce the high district own source revenue to finance all their needs with the force of balance funds from the central government. The existence of proper management on the district own source revenue and the balance funds by local governments is expected to resolve some of the economic problems in Banyuwangi, including the alleviation amount of poverty. The purpose of this research was to determine the influence of district own source revenue and balance fund to the amount of poverty at Banyuwangi district on 2000-2012. This research is quantitative research. Source of data used secondary data includes district own source revenue data, balance fund, and amount of poverty. The method used in this research is classical assumption, statistical descriptive analysis, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results of this research indicate that each an increase in district own source revenue will affect the amount of poverty reduction. Therefore district own source revenue have significant influence to the number of poverty at Banyuwangi on 2000-2012 year. In addition, each of the increase in balance fund will affect the amount of poverty reduction. Therefore the balance fund have significant influence to the amount of poverty at Banyuwangi on 2000-2012 year.

Keywords: amount of poverty, balance fund, district own source revenue, fiscal decentralization, local autonomy

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari 34 provinsi. Setiap provinsi yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai Kabupaten dengan potensi yang berbeda-beda. Setiap potensi ini akan menghasilkan berbagai keunggulan yang membedakan Kabupaten tersebut dengan Kabupaten

lainnya. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak Kabupaten bagian dengan banyak penduduk. Salah satu Kabupaten bagian dari provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi adalah Kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa yang memiliki beberapa potensi wilayah yang dapat dijadikan sebagai sebuah keunggulan, terutama dibidang wisatanya. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi wisata yang besar terutama di bidang wisata pantai. Letak geografis Kabupaten Banyuwangi membawa sebuah keuntungan tersendiri. Keunggulan Kabupaten Banyuwangi di bidang wisata pantai ini menciptakan banyak peluang, apabila dimanfaatkan akan menghasilkan penghasilan. Penghasilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi Kabupaten Banyuwangi sendiri selaku daerah otonom.

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah otonom termasuk Kabupaten Banyuwangi diatur oleh otonomi daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Adanya otonomi daerah melahirkan berbagai bentuk desentralisasi yang salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Munculnya desentralisasi fiskal menuntut setiap wilayah daerah termasuk Kabupaten Banyuwangi untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri. Banyuwangi sebagai suatu wilayah Kabupaten dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi untuk membiayai segala kebutuhannya. Selain dari PAD pihak pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya melalui dana perimbangan. Keberadaan PAD dan dana perimbangan dalam suatu daerah harus mampu diolah secara tepat oleh pihak pemerintah daerah. Adanya pengelolaan yang tepat sasaran atas PAD dan dana perimbangan oleh pihak Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tersebut. Oleh karena itu setiap perolehan pendapatan baik PAD maupun dana perimbangan oleh pihak Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan sasaran.

PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri, melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri dan diatur berdasarkan peraturan daerah. Menurut Halim (2004:94), "PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa "pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah." Dengan adanya potensi wisata pantai yang ada di Kabupaten Banyuwangi tersebut tentunya akan menghasilkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

yang lebih besar. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa keberadaan potensi wisata wilayah yang strategis pada Kabupaten Banyuwangi tentunya akan menghasilkan PAD yang besar apabila potensi tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal.

Pengelolaan potensi wisata wilayah di Kabupaten Banyuwangi secara maksimal akan menghasilkan PAD yang besar pula. Besarnya nilai pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari pengelolaan potensi wilayah tersebut akan menciptakan berbagai peluang positif bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Peluang positif tersebut akan menciptakan berbagai kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam menjalankan roda pemerintahannya, termasuk untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang terjadi selama menjalankan roda pemerintahan. Selain PAD dana daerah juga ditunjang dengan oleh dana perimbangan Menurut Bastian (2006: 338), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Lahirnya desentralisasi menuntut pihak pemerintah daerah untuk mandiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya melalui pengelolaan potensi daerah secara mandiri. Adanya kemandirian daerah dalam mengelola potensinya tersebut tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki suatu daerah. Lahirnya desentralisasi ini tidak hanya menuntut pemerintah daerah untuk mengolah potensinya saja, melainkan juga membiayai kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri. Pemenuhan kebutuhan daerah bukan hanya berasal dari dana mandiri hasil pengelolaan sumber daya daerahnya saja melainkan juga dari dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai pengeluarannya. Adanya dana transfer dari pemerintah pusat ini akan membantu pemerintah daerah dalam mendanai pemenuhan kebutuhannya.

Dana perimbangan ini dialokasikan kepada daerah-daerah untuk menunjang pendanaan berbagai kebutuhan daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Penggunaan Dana alokasi umum (DAU) diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana bagi hasil (DBH) adalah

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adanya pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan akan mampu membantu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan inovasi baru dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Inovasi baru dalam menjalankan roda pemerintahan yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Banyuwangi melalui PAD yang dibantu oleh dana perimbangan diantaranya adalah menciptakan berbagai peluang bisnis baru maupun menciptakan kesempatan kerja untuk semua warga kota Banyuwangi. Terciptanya peluang kerja dan kesempatan kerja ini akan mampu memberdayakan masyarakat kota Banyuwangi itu sendiri dan menambah jumlah pendapatan masyarakatnya. Selain itu PAD yang dihasilkan dari pengelolaan potensi wilayah kota banyuwangi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. Menurut Mudrajad (1997: 102–103), “kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang berada dalam kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Kemiskinan sendiri dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor baik yang berasal dari diri secara pribadi maupun karena lingkungan. Secara pribadi kemiskinan terjadi karena tidak adanya keinginan dan motivasi dari diri seseorang untuk merubah nasibnya. Selain itu kemiskinan juga dapat dikarenakan tidak adanya kesadaran dalam diri individu untuk mengenyam bangku pendidikan. Selain itu faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah kondisi lingkungan yang sangat mendukung untuk bermalasan dan pasrah dengan keadaan. Tidak adanya keterampilan khusus yang dimiliki dan dimanfaatkan juga dapat mendorong terjadinya kemiskinan. Tingginya jumlah penduduk miskin yang terjadi akan menurunkan nilai indeks pembangunan manusia

Adanya pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan untuk mengentaskan kemiskinan akan meningkatkan nilai indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak, sehingga indeks pembangunan manusianya juga akan semakin meningkat. Pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan secara maksimal dan tepat dapat membawa dampak yang positif dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Permasalahan yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin. Apabila semakin tinggi pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin maka nilai kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi akan semakin menurun tiap tahunnya. Namun apabila semakin rendah pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi akan cenderung tetap ataupun bahkan meningkat setiap tahunnya.

Penelitian ini memiliki 2 hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012. Hipotesis kedua menyatakan bahwa pdana perimbangan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012.

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berbentuk data kurun waktu (*time series*) tahunan untuk tahun 2000-2012 dari variabel yang digunakan. Data yang dimaksud diatas meliputi data jumlah penduduk miskin, data PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah, dan data dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2000 sampai tahun 2012. Sumber data penelitian ini diperoleh dari BPS Kabupaten Banyuwangi, BPS Provinsi Jawa Timur, RPJM Kabupaten Banyuwangi dan literatur lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah penduduk miskin di kabupaten Banyuwangi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis. Sampel penelitian yang diambil adalah berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

1. Data tersebut berasal dari sumber literatur yang telah ditentukan
2. Data yang digunakan tersebut meliputi data jumlah penduduk miskin, PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan, DAU, DAK, dan DBH Kabupaten Banyuwangi.
3. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2000-2012.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik uji instrument, uji statistik, uji asumsi klasik, Uji statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji hipotesis yang meliputi uji F dan uji t serta uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Ket.	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
PAD (X ₁)	13	2.E10	1.E11	6.05E10	2.870E10
Dana Perimbangan (X ₂)	13	6.E11	1.E13	6.89E12	2.191E13
Jumlah Penduduk Miskin (Y)	13	155797	310627	233409,23	51456,905
Valid N (listwise)	13				

Sumber : Data diolah, April 2015

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dengan jumlah data adalah sebanyak 13. Variabel jumlah penduduk miskin (Y) mempunyai rata-rata sebesar 233.409,23 jiwa, dengan nilai minimal sebesar 155.797 jiwa, nilai maksimal sebesar 310.627 jiwa dan nilai standar deviasinya adalah 51456,905. Variabel PAD (X₁) mempunyai rata-rata sebesar Rp6.05E10 atau Rp60.529.127.990,14, nilai minimal sebesar Rp2.E10 atau Rp.23.624.076.936,95, nilai maksimalnya Rp1.E11 atau Rp115.406.002.506,00, serta nilai standar deviasinya 2.870E10. Variabel Dana Perimbangan (X₂) mempunyai rata-rata sebesar Rp6.89E12 atau Rp6892710302518.57 dengan nilai minimal sebesar Rp6.E11 atau Rp 619.027.839.540,78, nilai maksimal sebesar Rp1.E13 atau Rp1.036.440.536.941,85 dan standar deviasinya sebesar 2.191E13.

Uji Statistik

1. Analisis Rregresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel dependen pada satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Hasil nalisis Rregresi Linier Berganda

Variabel Independen	Unstandardized	t	t _{tabel}	Sig	a	Ket
	Coefficient					
(Constant)	240631,304	-	-	-	-	-
PAD (X ₁)	-0,679	-6,913	> -4,302	0,009	< 0,05	Sig
Dana Perimbangan (X ₂)	-0,563	-5,858	> -4,302	0,016	< 0,05	Sig
Adjusted R Square =0,848				F. Hitung = 31,282		
				Sig. F = 0,004		

Sumber : Data diolah, April 2015

Berdasarkan koefisien regresi, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah ;

$$Y = 240631,304 + (-0,679) X_1 + (-0,563) X_2$$

1. Nilai konstanta 240631,304, menunjukkan bahwa jika tidak ada PAD dan Dana Perimbangan maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 240631,304 jiwa.
2. Nilai koefisien -0,679 pada PAD, menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi sebesar -0,679;
3. Nilai koefisien -0,563 pada Dana Perimbangan, menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Perimbangan, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi sebesar -0,563.

2. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap variabel *dependen* yaitu jumlah penduduk miskin secara simultan. Tabel distribusi F dicari pada $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan (df) df1 atau 3-1 = 2, dan df2 n-k atau 13-2 = 11. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil, yaitu bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ (31,282 > 19) dan signifikasi (0,004 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

3. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen* secara signifikan secara parsial. Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ (uji 2 sisi, 0,05 : 2 = 0,025), dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 13-2-1 = 10. Hasil analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, dan Dana Perimbangan terhadap variabel *dependen* yaitu jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara parsial) diperoleh hasil yang dapat dinyatakan berikut;

1. Variabel PAD (X₁) memiliki nilai t -6,913 > 4,302 dan signifikasi 0,009 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.;
2. Variabel Dana Perimbangan (X₂) memiliki nilai t -5,858 > 4,302 dan signifikasi 0,016 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti secara parsial variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

4. Koefisien Determinasi

Berfungsi untuk mengetahui besarnya proporsi atau sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen secara keseluruhan, maka dapat ditentukan dengan uji koefisien determinasi berganda (R^2). Dilihat dari nilai koefisien determinasi berganda, hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel PAD, dan Dana Perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square (R^2) menunjukkan sebesar 0,848 atau 84,8 % dan sisanya 15,2 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, jumlah pengangguran, jumlah usaha yang akan memberikan penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan perkapita.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak.

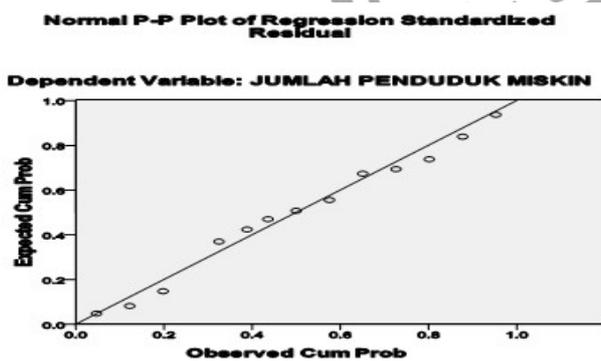
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Test of Normality	Kolmogorov-Smirnov		
	Sig	Cut Off	Keterangan
PAD (X_1)	0,882	> 0,05	Normal
Dana Perimbangan (X_2)	0,601	> 0,05	Normal
Jumlah Penduduk Miskin (Y)	0,694	> 0,05	Normal

Sumber : Data diolah, April 2015

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau signifikansi untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Dari data diatas dapat diperoleh gambar sebagai berikut



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Gambar 1 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear dalam variabel independen dalam model

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Test of Multikolinierity	VIF	Cut Off	Keterangan
PAD (X_1)	1,001	< 10	Tidak terjadi multikolinieritas
Dana Perimbangan (X_2)	1,001	< 10	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data diolah, April 2015

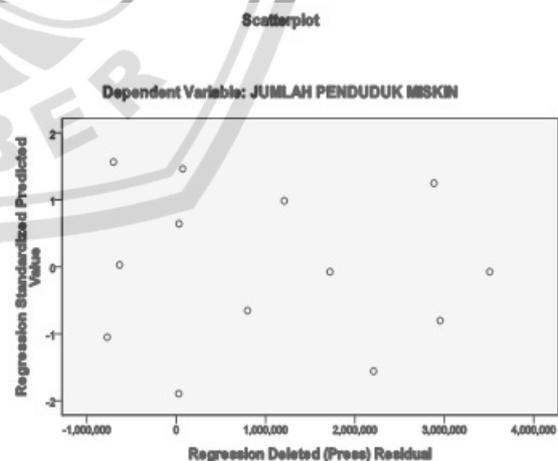
Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen karena menunjukkan nilai VIF kurang dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:39). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 2 menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas, karena tebaran data tidak membentuk garis tertentu atau tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Nilai D-W	Keterangan
1,344	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data diolah, April 2015

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* dari persamaan diatas pada penelitian ini berada diantara -2 sampai dengan +2, maka dapat diartikan bahwa dari kedua model persamaan regresi yang telah dirumuskan tidak terjadi autokorelasi.

Pembahasan

Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi dengan arah negatif. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan, “terdapat pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi” adalah diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa jika PAD, dan Dana Perimbangan memiliki nilai negatif, maka akan memberikan pengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. Sebaliknya, jika memiliki nilai positif maka akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

Pengaruh PAD Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Pendapatan asli daerah merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan potensi wilayah asli daerah tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAD sebesar -0,679 atau -67,9% dengan arah negatif. Hal ini berarti bahwa setiap adanya kenaikan PAD maka akan mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin. Apabila terdapat penurunan PAD maka akan mempengaruhi menambah jumlah penduduk miskin. Penelitian ini menemukan bahwasannya PAD berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012. PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya nilai PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk membangun industri kreatif dan menggali potensi daerah secara lebih dalam lagi untuk menciptakan perusahaan-perusahaan daerah yang lebih produktif. Peningkatan peluang usaha kreatif yang tercipta melalui pengelolaan PAD akan mampu mengurangi angka pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi sendiri. Peningkatan peluang usaha kreatif nantinya akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Semakin banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur. Adanya berbagai usaha kreatif yang dibangun dari PAD ini

diharapkan dapat meningkatkan nilai pendapatan yang diterima oleh masyarakat kabupaten Banyuwangi. Semakin tingginya nilai pendapatan yang diterima oleh masyarakat maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi mampu memenuhi berbagai bentuk kebutuhannya terutama kebutuhan pokok hidupnya baik kebutuhan pangan, pakaian maupun tempat tinggal yang layak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2013) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kemiskinan daerah, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Setiyawati (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh sebesar terhadap kemiskinan sebesar 9,66%. Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh Iskana (2009) menyatakan bahwa pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Astuti yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin per desa di Kabupaten Kebumen tahun 2009-2011. Hal ini berarti, ketika jumlah PADs suatu desa bertambah besar, maka jumlah KK miskin akan berkurang. Dari hasil penelitian tersebut, terlihat bagaimana peran penting PADs dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus menggali potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, supaya jumlah PAD meningkat. Oleh karena itu semakin tingginya nilai PAD di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja dan secara tidak langsung akan memberikan dampak yang baik terhadap pendapatan bagi masyarakatnya yang nantinya akan perlahan-lahan mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Dana perimbangan merupakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Dana Perimbangan sebesar -0,563 atau -56,3% dengan arah negatif. Hal ini berarti bahwa setiap adanya kenaikan dana perimbangan maka akan mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin. Apabila terdapat penurunan dana

perimbangan maka akan mempengaruhi menambah jumlah penduduk miskin. Penelitian ini menemukan bahwasannya dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012.

Besarnya nilai dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah akan memberikan kontribusi terhadap pemerataan kemampuan keuangan didalam suatu daerah. Penerimaan dana perimbangan sangat penting dalam menyukseskan program pemerintah dalam melakukan pembangunan didalam suatu wilayahnya. Pembangunan wilayah ini akan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang nantinya mampu menunjang laju pertumbuhan disektor perekonomian yang ada. Laju pertumbuhan disektor perekonomian yang ada tentunya akan memberikan peluang pada masyarakat untuk dapat bekerja atau berwirausaha. Dengan adanya peluang usaha tersebut maka akan memberikan pendapatan bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat akan mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk hidupnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2013) yang menyatakan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap kemiskinan daerah, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Setiyawati (2007) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap kemiskinan sebesar 4,9% dan terhadap pengangguran sebesar 8,6%. Dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah akan memberikan pengaruh yang besar terhadap laju pertumbuhan dan pembangunan yang ada didalam suatu wilayah. Dana perimbangan yang bersifat vital ini mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai macam ekonomi industri dan produktif, yang nantinya akan memberikan pengaruh dalam memberikan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakatnya. Adanya penyerapan tenaga kerja ini perlahan akan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada didalam suatu wilayah.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Secara simultan PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan secara bersama akan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.
2. Secara parsial PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pengelolaan dana

PAD maupun dana perimbangan akan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dilakukan pada satu wilayah saja yakni Kabupaten Banyuwangi. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menggunakan dua atau lebih wilayah kabupaten sebagai objek penelitian, sehingga dapat membandingkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain.
2. Sulitnya memperoleh data secara akurat karena rata-rata tiap sumber menyajikan data yang berbeda-beda. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika hanya menggunakan satu sumber data sehingga tidak menimbulkan kebingungan.
3. Fokus penelitian hanya terpusat pada jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi saja. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menggunakan berbagai jenis lapisan masyarakat sehingga hasil penelitiannya lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Astuti, Prihartini Budi. Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Jumlah Penduduk terhadap jumlah kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. *Jurnal*. Tidak dipublikasikan.
- Bastian, Indra. 2006. **Akuntansi sektor publik di Indonesia..** Yogyakarta : BPFE
- Halim, Abdul. 2004. **Akuntansi Keuangan Daerah.** Jakarta: SalembaEmpat
- Hamzah, Ardi dan Setiyawati, Anis. 2007. "Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Desember 2007, vol. 4. No 2, hal 211-228.
- Iskana, Ida. 2009. "Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran". Skripsi.tidak dipublikasikan, Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang
- Latan, Hengky. 2013. **Analisis Multivariat Teknik dan Aplikasi.** Bandung :Alfabeta
- Mudrajad, Kuncoro. 1997. **Ekonomi Pembangunan:Teori, Masalah, dan Kebijakan.** Yogyakarta: YKPN.
- Presiden Republik Indonesia. 2004. **Undang-Undang Nomor 32 Tentang Peraturan Daerah.** Jakarta: Tidak Diterbitkan
- Santoso, Budi. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia". *Jurnal Akuntansi*. Juli 2013. Vol. 5. No 2.